BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diperlukan untuk menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan perkembangan kondisi fiskal, hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama, serta perubahan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan proyeksi pendapatan transfer, penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit, kewajiban daerah yang harus dipenuhi, dan kebutuhan pergeseran alokasi antarunit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, serta jenis belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diawali dengan Perubahan RKPD, dilanjutkan dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran operasional dari Perubahan KUA yang telah disepakati bersama. Dokumen ini memuat perubahan prioritas pembangunan daerah dan perubahan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada perangkat daerah untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Plafon yang disajikan telah menjadi kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026.

Penentuan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan secara terukur, realistis, serta berorientasi pada

pencapaian hasil pembangunan. Prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian sasaran RPJMD dan Perubahan RKPD, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi, serta penyelesaian kewajiban daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perubahan alokasi anggaran bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah untuk:

1. menetapkan perubahan prioritas pembangunan daerah berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026;
2. menetapkan perubahan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
3. menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD Perubahan;
4. menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, target kinerja, dan kemampuan keuangan daerah; dan
5. menjadi bahan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati mengenai Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2026; dan
16. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Kemampuan pendanaan pembangunan daerah bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Berdasarkan perkembangan realisasi serta perubahan kebijakan transfer, proyeksi pendapatan daerah dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.744.679.585.630,96, berkurang Rp182.574.996.087,04 atau 9,47% dibandingkan target dalam KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 (murni) sebesar Rp1.927.254.581.718,00.

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat Rp3.255.341.486,96 menjadi Rp261.558.485.644,96. Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun Rp192.089.085.009,00 menjadi Rp1.468.546.265.404,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat Rp6.258.747.435,00 menjadi Rp14.574.834.582,00. Perubahan penerimaan pembiayaan terutama berasal dari penyesuaian SiLPA hasil audit, dari Rp387.960.299.049,00 menjadi Rp154.055.122.582,44.

2.1. Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Tabel 2.1. Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	KUA–PPAS 2026 (Murni) (Rp)	Perubahan KUA–PPAS 2026 (Rp)	+ / - (Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.927.254.581.718,00**	**1.744.679.585.630,96**	**-182.574.996.087,04**	**-9,47**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**258.303.144.158,00**	**261.558.485.644,96**	**3.255.341.486,96**	**1,26**
4.1.01	Pajak Daerah	30.378.384.000,00	41.517.189.000,00	11.138.805.000,00	36,67
4.1.02	Retribusi Daerah	11.002.040.800,00	20.350.055.278,00	9.348.014.478,00	84,97
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.315.979.422,00	8.164.016.574,00	-151.962.848,00	-1,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.606.739.936,00	191.527.224.792,96	-17.079.515.143,04	-8,19
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.660.635.350.413,00**	**1.468.546.265.404,00**	**-192.089.085.009,00**	**-11,57**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.438.837.553.287,00	1.271.104.842.154,00	-167.732.711.133,00	-11,66
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.797.797.126,00	197.441.423.250,00	-24.356.373.876,00	-10,98
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.316.087.147,00**	**14.574.834.582,00**	**6.258.747.435,00**	**75,26**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	8.316.087.147,00	14.574.834.582,00	6.258.747.435,00	75,26

Kode	Uraian	KUA–PPAS 2026 (Murni) (Rp)	Perubahan KUA–PPAS 2026 (Rp)	+ / - (Rp)	%
	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**387.960.299.049,00**	**154.055.122.582,44**	**-233.905.176.466,56**	**-60,29**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	387.960.299.049,00	154.055.122.582,44	-233.905.176.466,56	-60,29
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**387.960.299.049,00**	**154.055.122.582,44**	**-233.905.176.466,56**	**-60,29**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**2.315.214.880.767,00**	**1.898.734.708.213,40**	**-416.480.172.553,60**	**-17,99**

Sumber: Lampiran Tabel 2.1 KUPA SIPD-RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK-RI. Nilai yang dapat digunakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah Rp154.055.122.582,44, berkurang Rp233.905.176.466,56 atau 60,29% dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 (murni) sebesar Rp387.960.299.049,00. Penggunaan SiLPA diarahkan untuk menutup defisit anggaran dalam Perubahan APBD dan membiayai kebutuhan prioritas yang telah ditetapkan.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan arah kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan capaian pelaksanaan APBD semester pertama, perubahan kemampuan pendanaan, kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, pencapaian target pembangunan, serta kewajiban daerah yang harus diselesaikan. Belanja daerah diarahkan secara selektif pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan Perubahan RKPD, bersifat wajib dan mengikat, mendukung prioritas nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta realistis untuk dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Penajaman alokasi dilakukan melalui rasionalisasi belanja yang belum efektif, penyesuaian target keluaran sub kegiatan, pemenuhan kebutuhan mendesak, serta penataan kembali sumber dana dan lokasi pelaksanaan. Setiap perubahan plafon harus diikuti penyesuaian indikator kinerja secara terukur dan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026.

3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Lampiran Tabel 3.3 KUPA SIPD-RI, perubahan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dikelompokkan ke dalam empat prioritas utama:

1. Peningkatan Kualitas SDM;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Matriks Tabel 3.3 memuat program, indikator kinerja, perangkat daerah pelaksana, serta perbandingan pagu sebelum dan sesudah perubahan. Karena satu program dapat muncul pada beberapa indikator, unit, atau lokasi, nilai pada matriks prioritas tidak dijumlahkan sebagai total belanja daerah. Matriks lengkap menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perubahan PPAS.

3.3. Sinkronisasi dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Sinkronisasi kebijakan pembangunan dilakukan melalui Lampiran Tabel 3.1 mengenai sinergitas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap prioritas pembangunan nasional, serta Lampiran Tabel 3.2 mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Program yang dicantumkan dalam kedua lampiran tersebut menjadi dasar pengendalian konsistensi antara arah kebijakan, indikator kinerja, perangkat daerah pelaksana, dan plafon anggaran sementara.

3.4. Plafon Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Lampiran Tabel 3.4 KUPA SIPD-RI memuat plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan, dilengkapi indikator kinerja, target, lokasi, pagu sebelum perubahan, pagu setelah perubahan, perubahan pagu, serta prakiraan maju. Lampiran penetapan berstatus Terkunci.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Plafon pada Lampiran Tabel 3.4
Tahun Anggaran 2026

Uraian	Jumlah
Plafon KUA–PPAS 2026 (murni), verifikasi independen dari ekstraksi Tabel 3.4	**Rp2.270.214.880.767,00**
Plafon Perubahan KUA–PPAS 2026, verifikasi independen dari ekstraksi Tabel 3.4	**Rp1.888.734.708.213,40**
Bertambah/(berkurang), verifikasi independen dari ekstraksi Tabel 3.4	**(Rp381.480.172.553,60)**
Jumlah baris sub kegiatan	**1.648 baris**
Kode sub kegiatan unik	**1.330 kode**

Sumber: Lampiran Tabel 3.4 KUPA SIPD-RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, status Terkunci, dicetak 14 Agustus 2026 pukul 21.18.

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Perubahan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 4.1. Rincian lebih lanjut menurut perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan tersedia pada lampiran SIPD-RI.

Tabel 4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026

Kode	Urusan Pemerintahan/Unsur	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	429.929.659.517,00	403.379.414.949,00	-26.550.244.568,00
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	636.468.080.000,00	533.159.792.800,00	-103.308.287.200,00
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	309.406.311.354,98	271.790.559.911,00	-37.615.751.443,98
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	61.404.048.662,00	39.602.097.530,00	-21.801.951.132,00
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17.800.000.000,00	19.898.281.337,00	2.098.281.337,00
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	16.010.003.037,00	19.511.282.602,00	3.501.279.565,00
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	13.683.689.753,00	12.781.440.504,00	-902.249.249,00
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.289.996.963,00	1.571.061.044,00	281.064.081,00
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8.829.195.256,00	6.423.300.555,00	-2.405.894.701,00
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.095.951.039,00	1.896.411.233,00	-199.539.806,00
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	29.902.044.001,00	29.044.442.944,00	-857.601.057,00
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.550.000.000,00	8.615.816.096,00	65.816.096,00
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.034.000.000,00	10.693.750.576,00	659.750.576,00
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.500.000.000,00	4.466.032.000,00	-2.033.968.000,00
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	14.097.955.999,00	24.844.250.661,00	10.746.294.662,00
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	9.219.997.606,00	13.687.585.558,00	4.467.587.952,00

Kode	Urusan Pemerintahan/Unsur	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8.131.207.675,00	5.329.427.398,00	-2.801.780.277,00
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.297.310.247,00	7.141.923.049,00	-2.155.387.198,00
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	25.250.000.000,00	14.683.468.282,00	-10.566.531.718,00
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	330.325.200,00	291.236.000,00	-39.089.200,00
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	299.677.194,00	166.712.284,00	-132.964.910,00
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.688.240.230,00	1.431.670.892,00	-1.256.569.338,00
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	8.000.028.025,00	8.970.789.246,00	970.761.221,00
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	499.971.975,00	804.238.479,00	304.266.504,00
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	6.895.801.431,00	5.269.705.243,00	-1.626.096.188,00
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7.648.240.997,97	5.309.750.100,00	-2.338.490.897,97
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	55.185.000.000,00	38.081.152.194,00	-17.103.847.806,00
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.919.024.389,93	8.032.743.962,75	1.113.719.572,82
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.899.767.900,00	5.835.069.694,00	3.935.301.794,00
4.01	Sekretariat Daerah	88.875.200.000,00	84.844.598.207,00	-4.030.601.793,00
4.02	Sekretariat Dprd	65.150.000.000,00	62.359.072.698,00	-2.790.927.302,00
5.01	Perencanaan	11.508.157.672,00	9.175.638.576,00	-2.332.519.096,00
5.02	Keuangan	267.759.344.540,12	132.878.980.387,65	-134.880.364.152,47
5.03	Kepegawaian	29.395.838.327,00	12.480.696.393,00	-16.915.141.934,00
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	491.168.840,00	596.968.140,00	105.799.300,00
6.01	Inspektorat Daerah	19.631.642.935,00	14.776.297.526,00	-4.855.345.409,00
7.01	Kecamatan	57.588.000.000,00	53.886.891.894,00	-3.701.108.106,00
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.550.000.000,00	15.022.157.268,00	-6.527.842.732,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	**2.270.214.880.767,00**	**1.888.734.708.213,40**	**-381.480.172.553,60**

Sumber: Lampiran Tabel 4.1 KUA SIPD-RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, status Terkunci, dicetak 14 Agustus 2026 pukul 21.18.

4.2. Perubahan Plafon Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja daerah dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.888.734.708.213,40, berkurang Rp381.480.172.553,60 atau 16,80% dibandingkan plafon dalam KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 (murni) sebesar Rp2.270.214.880.767,00. Perubahan tersebut terdiri atas penyesuaian Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.270.214.880.767,00**	**1.888.734.708.213,40**	**-381.480.172.553,60**	**-16,80**

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.640.770.296.408,90**	**1.484.556.382.906,40**	**-156.213.913.502,50**	**-9,52**
5.1.01	Belanja Pegawai	735.471.327.746,00	622.437.808.864,00	-113.033.518.882,00	-15,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.125.473.453,90	782.543.357.642,40	-29.582.115.811,50	-3,64
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00	190.000.000,00	-110.000.000,00	-36,67
5.1.05	Belanja Hibah	58.906.245.209,00	47.006.766.400,00	-11.899.478.809,00	-20,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.967.250.000,00	32.378.450.000,00	-1.588.800.000,00	-4,68
5.1.07	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**388.493.152.493,98**	**297.377.610.779,00**	**-91.115.541.714,98**	**-23,45**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.400.000.000,00	9.847.425.851,00	-20.552.574.149,00	-67,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.739.568.446,00	44.578.900.318,00	-43.160.668.128,00	-49,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.237.385.600,00	70.076.737.252,00	-38.160.648.348,00	-35,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.900.146.254,98	171.639.632.058,00	9.739.485.803,02	6,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.500.000,00	1.230.708.800,00	1.088.208.800,00	763,66
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	73.552.193,00	4.206.500,00	-69.345.693,00	-94,28
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.528.455.787,00**	**15.000.000.000,00**	**-5.528.455.787,00**	**-26,93**
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.528.455.787,00	15.000.000.000,00	-5.528.455.787,00	-26,93
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**220.422.976.077,12**	**91.800.714.528,00**	**-128.622.261.549,12**	**-58,35**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.862.193.937,00	5.000.242.528,00	1.138.048.591,00	29,47
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.560.782.140,12	86.800.472.000,00	-129.760.310.140,12	-59,92

Sumber: Lampiran Tabel 4.2 KUA SIPD-RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, status Terkunci, dicetak 14 Agustus 2026 pukul 21.19.

Komposisi belanja setelah perubahan terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.484.556.382.906,40 atau 78,60%; Belanja Modal sebesar Rp297.377.610.779,00 atau 15,74%; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 0,79%; dan Belanja Transfer sebesar Rp91.800.714.528,00 atau 4,86% dari total belanja daerah.

4.3. Plafon Menurut Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rincian plafon menurut perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan disajikan dalam Lampiran Tabel 4.1 dan Tabel 3.4 SIPD-RI. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan PPAS dan menjadi batas tertinggi sementara bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD Perubahan. Dalam pengolahan data, unit layanan seperti RSUD, Puskesmas, bidang, UPT, kecamatan, dan kelurahan tetap mengikuti

kode serta nomenklatur yang tercantum dalam SIPD-RI dan tidak dihitung sebagai perangkat daerah utama tanpa konsolidasi.

4.4. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat

Pengendalian pemenuhan belanja wajib dan mengikat dilakukan berdasarkan laporan tematik SIPD-RI. Data bersumber dari laporan tematik SIPD-RI pada jadwal Penetapan KUPA PPAS Tahun 2026 yang berstatus Terkunci.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Sementara Pemenuhan Belanja Wajib
Tahun Anggaran 2026

Jenis Alokasi	Alokasi (Rp)	Dasar Perhitungan (Rp)	Rasio	Status
Fungsi Pendidikan	432.934.776.716,00	1.888.734.708.213,40	22,92%	Memenuhi minimal 20%
Infrastruktur Pelayanan Publik	791.402.765.309,50	1.883.734.465.685,40	42,01%	Memenuhi menurut laporan SIPD-RI
Belanja Pegawai di luar tunjangan guru melalui TKD	534.516.994.864,00	1.888.734.708.213,40	28,30%	Memenuhi batas maksimal 30%
Unsur Pengawasan/APIP	7.864.470.673,00	1.888.734.708.213,40	0,42%	Belum memenuhi 0,75% dan Rp10 miliar

Sumber: Laporan Tematik KUPA–PPAS SIPD-RI.

Denominator infrastruktur pada laporan SIPD-RI sebesar Rp1.883.734.465.685,40 hanya mengurangi Belanja Bagi Hasil dari total belanja daerah. Apabila Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sama-sama dikeluarkan dari denominator, denominator menjadi Rp1.796.933.993.685,40 dan rasio infrastruktur menjadi 44,04%. Kedua skenario memenuhi batas minimal 40%, namun dasar denominator harus dikonfirmasi sebelum finalisasi.

4.5. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah

Laporan tematik SIPD-RI digunakan untuk menguji keterhubungan antara penerimaan tertentu dan belanja yang ditandai. Nilai nol pada kolom alokasi tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya belanja terkait, tetapi dapat mengindikasikan penandaan sumber dana yang belum lengkap.

Tabel 4.4. Rekapitulasi Penandaan Tematik Penerimaan Pajak
Tahun Anggaran 2026

Jenis Penerimaan	Pendapatan (Rp)	Alokasi Terbaca (Rp)	Rasio	Status
Opsen PKB	12.536.972.000,00	3.754.568.450,00	29,95%	Memenuhi minimal 10%
PBJT Tenaga Listrik	11.184.094.000,00	0,00	0,00%	Perlu koreksi/verifikasi tagging
Bagi Hasil Pajak Rokok	43.651.312.169,00	0,00	0,00%	Perlu koreksi/verifikasi tagging
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	—	Tidak terdapat basis pendapatan

Sumber: Laporan Tematik Opsen PKB, PBJT-TL, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah SIPD-RI.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154.055.122.582,44. Pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Dengan demikian, pembiayaan netto dalam Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah Rp144.055.122.582,44, berkurang Rp198.905.176.466,56 dibandingkan pembiayaan netto dalam KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 (murni) sebesar Rp342.960.299.049,00.

Postur Perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp1.744.679.585.630,96 dan belanja daerah sebesar Rp1.888.734.708.213,40 sehingga menghasilkan defisit Rp144.055.122.582,44 atau 8,26% dari pendapatan daerah. Defisit tersebut ditutup seluruhnya oleh pembiayaan netto sehingga SiLPA tahun berkenaan diproyeksikan nihil.

Tabel 5.1. Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	KUA–PPAS 2026 (Murni) (Rp)	Perubahan KUA–PPAS 2026 (Rp)	+ / - (Rp)	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**387.960.299.049,00**	**154.055.122.582,44**	**-233.905.176.466,56**	**-60,29**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	387.960.299.049,00	154.055.122.582,44	-233.905.176.466,56	-60,29
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**45.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-35.000.000.000,00**	**-77,78**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-77,78
	PEMBIAYAAN NETTO	**342.960.299.049,00**	**144.055.122.582,44**	**-198.905.176.466,56**	**-58,00**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Lampiran Tabel 5.1 KUA SIPD-RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD Perubahan dengan tetap memperhatikan konsistensi terhadap Perubahan RKPD, Perubahan KUA, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemampuan keuangan daerah.

Apabila dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD terdapat penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atau Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; perubahan alokasi transfer; pemutakhiran petunjuk teknis; koreksi hasil verifikasi; atau keadaan lain yang memengaruhi postur anggaran, penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pembahasan yang berlaku.

Barabai, Agustus 2026

PIMPINAN DPRD HULU SUNGAI TENGAH,	WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
H. PAHRIJANI Ketua	**H. GUSTI ROSYADI ELMI**
TAJUDIN Wakil Ketua	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Tabel 2.1 KUPA SIPD-RI: Rencana Perubahan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah;
2. Lampiran Tabel 3.1 KUPA SIPD-RI: Sinergitas Program terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Lampiran Tabel 3.2 KUPA SIPD-RI: Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
4. Lampiran Tabel 3.3 KUPA SIPD-RI: Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah;
5. Lampiran Tabel 3.4 KUPA SIPD-RI: Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
6. Lampiran Tabel 4.1 KUA SIPD-RI: Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan;
7. Lampiran Tabel 4.2 KUA SIPD-RI: Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Jenis Belanja;
8. Lampiran Tabel 5.1 KUA SIPD-RI: Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan;
9. Laporan tematik mandatory spending fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, dan unsur pengawasan; dan
10. Laporan tematik penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB, PBJT Tenaga Listrik, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah.